

**KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan
Periode 2014-2015)**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh

**FITRI ANGGRAENI
NIM. 120563201022**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016**

Abstrak

Sektor pariwisata di Kabupaten Bintan menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan yaitu lebih dari 50%. Jika dilihat dari kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bintan tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari faktor alam cuaca kabut asap dan defisit anggaran yang menyebabkan beberapa *event* dari program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan tidak dapat terlaksana serta berdampak pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan.

Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Wahab (2014:24) menjelaskan bahwa hakikat kebijakan meliputi: tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, keluaran kebijakan dan hasil akhir kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan menyusun beberapa kebijakan/program kerja, yaitu: Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata serta Program Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa hakikat kebijakan diperincikan ke dalam beberapa kategori menurut Wahab (2014:24), sebagai berikut: Tuntutan kebijakan, pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan menggandeng pihak Swasta atau Pelaku Industri Pariwisata serta *Event Organizer* Internasional maupun lokal. Keputusan kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan, setiap Dinas diharuskan membuat Rencana Strategi untuk jangka waktu 5 tahun. Pernyataan kebijakan berupa Rencana Strategi kemudian dilegalkan melalui Perda tentang RPJMD 2010-2015. Keluaran kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan ialah berupa *event-event*, pengembangan destinasi wisata serta objek wisata yang dapat dirasakan langsung oleh wisatawan maupun masyarakat. Hasil akhir kebijakan berupa keberhasilan dalam meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan. Diharapkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan kedepannya untuk lebih aktif menggali potensi-potensi destinasi pariwisata baru di Kabupaten Bintan serta lebih gencar dalam mempromosikan Pariwisata Kabupaten Bintan baik di dalam maupun di luar Negeri agar dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Bintan.

Kata kunci: Kebijakan, Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Abstract

Tourism sector in Bintan Regency became one of the biggest contributors to domestic revenue which is more than 50%. When viewed from the tourist traffic visiting Bintan Regency in 2015 compared with the previous year the number of visitors decreased due to several factors ranging from natural disaster such as smog cloud from forest burn and budget deficit that led to some events that would be launched were not able to be implemented as well as the impact to revenue decline. The purpose of this study was to determine the role of the Department of Tourism and Culture policy of Bintan Regency to improve the domestic revenue.

The concept of theory used in this research is the theory from Wahab (2014:24) which explains that the essence of the policy includes: the demands of policy, policy decisions, policy statements, policy outputs and outcomes of policies. This study uses qualitative descriptive method. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation.

From the results of this research can be seen that to improve the domestic revenue, the Department of Tourism and Culture Bintan Regency developed several policies/programs, namely: Development program of tourism marketing, Development program of tourism destinations, also Human resources, cultures and tourism development programs. Based on the results of this research, author can conclude that the nature of policy are explain into several categories according to Wahab (2014:24), as follows: Policy demands, implementation of programs/activities of Culture and Tourism Office Bintan Regency perpetrators of Tourism Industry also domestic and International Event Organizer. Policy decisions in the policy making process, each Department is required to make the Strategic Plan for 5 years periode. The policy will be state in the form of the Strategic Plan and then legalized by Perda about RPJMD 2010-2015. Policy outputs Department of Tourism and Culture Bintan Regency is in the form of events, development of tourist destinations and attractions that can be felt directly by the tourists and the public. The final result of the success in increasing revenue (PAD) Bintan Regency. It is expected that the Department of Tourism and Culture Bintan Regency future to more actively explore potential new tourism destinations in Bintan Regency, and more aggressively promote Bintan Regency Tourism both within and outside the State in order to attract tourists to visit Bintan Regency.

Keywords: Policy, Tourism, Domestic Revenue

I. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu tumpuan perolehan devisa bagi sebagian besar wilayah di Indonesia, demikian juga dengan Kabupaten Bintan. Dengan gugusan Kepulauan yang dikelilingi oleh sumber daya kelautan yang indah dan beragam menjadikan Kabupaten ini sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial. Tidak hanya berjajarnya pantai-pantai yang indah namun juga panorama bawah laut yang tentu saja menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Bintan.

Kabupaten Bintan memiliki berbagai potensi daya tarik wisata dengan berbagai jenis dimana potensi objek wisata tersebut tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Bintan. Melihat kenyataan ini, maka sangatlah wajar apabila Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan dalam aspek ekonomi yaitu, dalam menambah pemasukan kas daerah (PAD) dan pendapatan masyarakat yang didukung dengan visi yang telah

ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan sampai tahun 2015 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bintan sebagai Destinasi wisata unggulan di Kepulauan Riau yang berwawasan wisata dan alam".

Sebagian besar penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan, hingga saat ini masih bertumpu pada sektor pariwisata. Dimana sebesar lebih dari 55,5% Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari sektor pariwisata sebesar Rp 92,79 milyar, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bintan tercatat sekitar Rp167,5 milyar dari Rp 176,6 milyar yang dihitung November 2015 akhir atau 95% dari yang ditargetkan. Adapun Rp 92,79 milyar tersebut diperoleh dari beberapa sektor yang terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, retribusi dan juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikawasan pariwisata terpadu Lagoi. <http://html.batampos.co.id/read/2015/12/12/30874/Wow-Pariwisata-Bintan-Dulang-Rp-9279-M>.

Tabel I.1
Target/anggaran dan Realisasi
Pendapatan Asli Daerah,
Kabupaten Bintan

No	Tahun	Target/Anggaran PAD	Realisasi PAD
1	2011	121.436.408.714,00	136.232.925.611,22
2	2012	130.138.946.500,00	136.243.748.620,87
3	2013	134.088.654.257,00	136.077.603.306,04
4	2014	166.125.051.486,00	191.110.776.362,25
5	2015	176.628.479.855,00	177.688.655.378,12

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kab. Bintan, 2016

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat target/anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan. Dapat dilihat juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 yang targetnya Rp121.436.408.714,00 dan realisasi capaiannya melebihi target yakni sebesar Rp136.232.925.611,22 selanjutnya jika kita lihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan pada tahun 2012 baik dari segi target dan realisasinya mengalami sedikit kenaikan yang tidak begitu besar yaitu Rp10.825.009,64. Beda halnya dengan tahun 2013 yang target nya lebih besar dari tahun sebelumnya,

akan tetapi realisasinya masih dibawah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012, meskipun turunnya tidak begitu besar yakni sekitaran Rp166.145.314,83. Dapat dilihat juga peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar Rp55.033.173.056,21 atau sebesar 44,4%. Kemudian untuk tahun 2015 realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan mengalami penurunan daripada tahun 2014, akan tetapi mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2015. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp13.422.120.984,13 atau \pm sebesar 7,8%.

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Bintan, terdapat beraneka ragam potensi wisata di Kabupaten Bintan yang dapat diandalkan seperti wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus, wisata kuliner dan lainnya. Dengan berbagai jenis potensi daya Tarik yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bintan ini akan menjadi daya Tarik wisatawan untuk berkunjung ke Bintan. Berikut perkembangan arus kunjungan

wisatawan ke Kabupaten Bintan tahun 2012-2014, sebagai berikut:

Tabel I.2
Arus Kunjungan Wisatawan
Kabupaten Bintan 2013-2015

No	Wisatawan	2013	2014	2015
1.	M mancanegara	324.689	331.209	323.209
2.	Nusantara	48.428	49.161	84.901
3.	Publik Area	78.463	121.900	85.385
	Jumlah	451.580	502.270	493.495

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan, 2016

Berdasarkan tabel I.2 dapat dilihat jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2013-2014 mengalami kenaikan selanjutnya jika dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan dan belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu sebesar 580.000. Terjadinya penurunan jumlah kunjungan wisatawan inilah mungkin yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan. Dimana sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pariwisata merupakan penyumbang terbesar

bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan jika dibandingkan dengan sektor lainnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan untuk lebih aktif dan lebih gencar dalam mempromosikan objek wisata, tempat-tempat wisatanya, melakukan kegiatan pengembangan objek wisata agar kunjungan wisatawan dapat lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan Periode 2014-2015).**

II. LANDASAN TEORI

1. Kebijakan/Program

Menurut Friedrich dalam buku Wahab (2014:9-10), "Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan

dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Menurut Wahab (2014:24), Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan itu dapat diperincikan lebih lanjut ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Tuntutan kebijakan ialah tuntutan atau desakan yang ditujukan pada pejabat pemerintah kemudian dilakukan oleh aktor-aktor. Tuntutan-tuntutan ini ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.
2. Keputusan kebijakan ialah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah untuk

memberikan keabsahan (legitimasi), kewenangan atau memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan.

3. Pernyataan kebijakan
Pernyataan kebijakan yaitu berupa pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai kebijakan tertentu, serta apasaja yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.
4. Keluaran kebijakan
Keluaran kebijakan merupakan wujud kebijakan publik yang paling konkret. Artinya, ia dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, karena menyangkut hal-hal yang dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.
5. Hasil akhir kebijakan
Yang dimaksud disini adalah akibat atau dampak langsung yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended*),

sebagai konsekuensi logis dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dimasyarakat.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2002:132), “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah”.

Menurut UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka sumber pendapatan daerah untuk membiayai APBD terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - i. Hasil pajak daerah
 - ii. Hasil retribusi daerah
 - iii. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - iv. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman daerah

- d. Lain-lain penerimaan daerah yang sah

III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:11) Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, karena data yang diperoleh tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Disamping itu juga akan dilakukan evaluasi secara formatif, penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jl. Trikora Km. 36 Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, dasar penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan.

3. Informan

Menurut Suyanto (2005:171-172), Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu: penentuan informan tidak didasarkan atas strata, pedoman atau wilayah tetapi didasarkan adanya tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan
2. BAPPEDA Kabupaten Bintan

3. Kasubag Penyusunan Program
4. Kabid Pemasaran Wisata
5. Kabid Pengembangan Destinasi Wisata
6. Kabid Pendapatan DPPKD Kabupaten Bintan

4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data yang penulis gambarkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

2. Data sekunder

Yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, artikel, jurnal serta

situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Hadi dalam Sugiyono (2013:166) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan untuk melihat bagaimana kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan tugasnya. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa daftar *checklist*.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2013:157) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara

terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan khusus yang telah dirancang sebelumnya. Wawancara ini akan dilakukan dengan pihak-pihak responden yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun alat yang digunakan yaitu pedoman wawancara (*interview guide*).

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Arikunto (2013:274), yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, foto-foto dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mendukung penelitian agar diperoleh hasil yang maksimal. Alat yang digunakan adalah kamera Hp.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2014:247) dalam model ini ada 3 alur

kegiatan atau komponen untuk analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/*verifikasi* yang dilakukan dengan bentuk interaksi dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) dengan suatu siklus. Ketiga kegiatan dalam model interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

c. Penarikan

kesimpulan/verifikasi

(*Conclution*

***Drawing/verification*)**

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif. Dimana data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan melakukan analisis terhadap masalah yang ditemukan dilapangan sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan/Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bintan

Dalam urusan Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan telah

melaksanakan kebijakan/program yang telah disusun dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang disumbangkan oleh sektor pariwisata di Kabupaten Bintan. Pada tahun 2014 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan menyusun 2 kebijakan/program selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan pariwisata pada tahun 2015 menjadi 3 kebijakan/program.

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Penyusunan program ini bertujuan untuk Peningkatan Informasi Pasar Pariwisata, Mempublikasikan dan Mempromosikan potensi Pariwisata yang dimiliki kedalam dan luar negeri, sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Dalam menjalankan program pengembangan pemasaran pariwisata upaya-upaya yang sudah dilakukan yakni mengikuti pameran-pameran di tingkat Nasional yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata. Ikut serta dalam pameran expo di 2 Daerah/lokasi yaitu Jakarta pada bulan Maret 2015 dan di Kalimantan

pada bulan Oktober 2015, diharapkan dapat mempromosikan pariwisata Kabupaten Bintan kepada pasar pariwisata baik Nasional maupun Mancanegara.

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini disusun dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata serta mengembangkan daya tarik wisatawan, sehingga mampu mendorong iklim investasi bidang pariwisata di Kabupaten Bintan.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan pemeliharaan objek atau kawasan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas objek wisata dan benda cagar budaya seperti terpeliharanya kawasan bukit kerang dan objek wisata kawasan Trikora KM 50 dan kawasan Trikora KM 52.

c. Program Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan

profesionalisme SDM seni, Budaya dan Pariwisata dengan memberikan pembekalan dan pelatihan sehingga dapat mengelola serta memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan lebih baik.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPDA) Kabupaten Bintan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Perda tentang RIPPANDA Kabupaten Bintan. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 dokumen payung hukum untuk Perencanaan Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Bintan.

2. Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bintan 2014-2015

Kunjungan wisatawan pada suatu daerah pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu Daerah. Menurunnya jumlah wisatawan pada tahun 2015 lalu dikarenakan ada beberapa *event* yang tidak bisa dilaksanakan seperti *Tour*

De Bintan, yang biasanya dilaksanakan setiap tahun tetapi untuk tahun 2015 *event* tersebut tidak bisa terlaksana dikarenakan beberapa faktor, sehingga sedikit wisatawan yang datang ke Kabupaten Bintan.

Tabel IV.3

Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bintan 2014-2015

No.	Wisatawan	2014	2015
1.	M mancanegara	331.209	323.209
2.	Nusantara	49.161	84.901
3.	Publik Area	121.900	85.385
	Jumlah	502.270	493.495

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan, 2016

Sepanjang tahun 2015 perkembangan industri pariwisata cukup berkembang dapat dilihat dengan perkembangan kawasan wisata Lagoi, serta kawasan wisata lainnya tentu ini sangat berpengaruh terhadap angka kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bintan, tetapi hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, tingkat kunjungan pada tahun 2015 mengalami penurunan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya masalah cuaca kabut asap dan masalah defisit anggaran.

3. Target/Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Bintan Pada Sektor Pariwisata 2014-2015

Menurut Mardiasmo (2002:132), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan secara keseluruhan pada tahun 2015 sebesar Rp 90.441.634.136,64 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sekitar Rp 2.938.715.881,16 yang mana realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan tahun 2014 yaitu sebesar Rp 93.380.350.017,80.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan yang bersumber dari sektor pariwisata antara lain dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi izin pariwisata, retribusi izin tempat penjualan beralkohol, serta pendapatan denda pajak yang mana total keseluruhan dari sektor Pariwisata inilah yang akan disumbangkan ke PAD Kabupaten Bintan yaitu sebesar

50,89% terhitung sampai akhir Desember 2015.

4. Hambatan-Hambatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:385) hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.

Berikut ini beberapa hambatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan *event-event* pariwisata, sebagai berikut:

1. Masih banyaknya Industri Pariwisata yang belum beroperasi.
2. Isu Teteris yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kunjungan dengan adanya beberapa Negara yang mengeluarkan *Travel Warning* terhadap warganya yang dating ke Indonesia.

3. Bencana kebakaran yang terjadi di kawasan Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan kondisi alam di Bintan tidak nyaman.
 4. Adanya beberapa penyakit meular (*Epidemic*) dan penyakit saluran pernafasan.
 5. Masih kurangnya promosi wisata melalui sarana dan prasarana informasi dan media visual.
 6. Masih terbatasnya infrastruktur penunjang pariwisata bagi kenyamanan wisatawan.
 7. Masih terbatasnya destinasi yang terbungkus dalam paket wisata sehingga berdampak pada tidak lamanya kunjungan wisatawan di Bintan.
 8. Pembangunan pariwisata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata hal ini perlu ditambah dengan pengembangan program kegiatan ekonomi kreatif bagi masyarakat disekitar objek wisata.
 9. Terbatasnya alokasi dana pada sektor pariwisata sehingga belum optimalnya program pariwisata yang telah direncanakan.
- Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bintan terus melakukan upaya-upaya agar kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan langkah-langkah yang tepat, adapun upaya yang dilakukan antara lain:
1. Melakukan perencanaan-perencanaan yang matang untung pengembangan objek wisata dan berusaha agar pendanaan untuk melakukan kegiatan pengembangan objek wisata dan kegiatan promosi wisata dapat ditingkatkan.
 2. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk menambahkan destinasi wisata melalui upaya-upaya promosi dalam dan luar negeri.
 3. Berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Pekerjaan Umum untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata.

4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah kawasan wisata melalui program pengembangan desa wisata.
 5. Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pihak swasta dalam penyelenggaraan *event-event* bertaraf internasional seperti *event Tour de Bintan, Kite Surfing, Metamen* dan *Triatlon*.
 6. Membentuk lembaga-lembaga pariwisata dan budaya untuk mendukung kegiatan kepariwisataan.
 7. Menggali potensi pariwisata yang dimiliki dengan menginventarisir dan merevitalisasi benda-benda sejarah, seni dan budaya yang dimiliki Kabupaten Bintan.
1. Dalam tuntutan kebijakan, pelaksanaan program/kegiatan *event-event* tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan, tidak sendirian melainkan juga menggandeng pihak Swasta atau Pelaku Industri Pariwisata serta *Event Organizer* Internasional maupun lokal.
 2. Keputusan kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan, seluruh Dinas di Instansi Pemerintah Daerah harus membuat rancangan awal program sebelum mendapatkan legalitas. Dalam hal ini setiap Dinas diharuskan membuat Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 tahun.
 3. Pernyataan kebijakan berupa Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan 2011-2015 yang merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran atau kondisi hasil yang akan dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan hakikat kebijakan diperincikan ke dalam beberapa kategori menurut Wahab (2014:24), sebagai berikut:

dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan kemudian dilegalkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015 dan Juga berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan.

4. Keluaran yang dihasilkan dari kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan ialah berupa *event-event*, pengembangan destinasi wisata serta objek wisata yang dapat dirasakan langsung oleh wisatawan maupun masyarakat seperti objek wisata pantai milik swasta maupun milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.
5. Hasil akhir kebijakan berupa keberhasilan sektor pariwisata yang sangat besar sekali pengaruhnya dalam meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan. Dalam pelaksanaan

program/kegiatan dimana *event-event* tersebut berhasil menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara, sehingga destinasi wisata di Bintan banyak dikunjungi yang kemudian berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Bintan.

B. Saran

1. Sektor pariwisata merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan, diharapkan kepada pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Bintan lebih memperhatikan dan lebih mensupport baik dari penganggaran, kegiatan, maupun motivasi kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan. Sehingga bisa membuat *event-event* baru yang bisa menarik wisatawan lebih banyak kedepannya.
2. Diharapkan kerjasama dan koordinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan berbagai pihak seperti swasta

maupun lintas sektorat lebih ditingkatkan. Contohnya koordinasi antara Dinas Pariwisata dengan BAPPEDA dalam mengembangkan Destinasi Pariwisata. Dimana seharusnya BAPPEDA dan Dinas Pariwisata saling berkoordinasi dalam membangun infrastruktur dan sarana prasarana yang menjadi penunjang pariwisata kabupaten bintan.

3. Diharapkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan kedepannya untuk lebih aktif menggali potensi-potensi destinasi pariwisata baru di Kabupaten Bintan, sehingga wisatawan merasa tertarik untuk mengunjungi objek-objek wisata baru tersebut.
4. Diharapkan kedepannya agar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan untuk lebih gencar dalam mempromosikan Pariwisata Kabupaten Bintan baik di dalam maupun di luar Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2012. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. *Edisi Ketiga Bahasa Depdiknasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- , 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Pendit, Nyoman S. 2006. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta Bandung.

- , 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suyanto, Bagong & Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, HAW. 2003. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jurnal dan Dokumen**
- Badan Pusat Statistik (BPS), Bintan Dalam Angka 2014
- Tendean, Jesica Carolin, Dkk. 2016. *“Pengaruh jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado melalui pajak hotel sebagai intervening”*. Skripsi Sarjana Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Putri, Rezi Kurnia. 2015. *“Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Bukittinggi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”*. Skripsi Sarjana Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2015.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2015.
- Marina, Herni. 2014. *“Ekonomi Politik Pariwisata Kawasan Wisata Lagoi*

- Kabupaten Bintan*".
Skripsi Sarjana Pada Fisip Umrah.
- Wahyuni, Sri Nur. 2016. "*Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pariwisata dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara*". Skripsi Sarjana Pada Fakultas FISIP Universitas Hasanuddin Makassar.
- Pleanggra, Ferry. 2012. "*Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*". Skripsi Sarjana Pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015-2025. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan 2014.
- Rekap Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2011-2015 (DPPKD) Kabupaten Bintan.
- Sinaga, Yulia Theresia. 2010. "*Peranan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dalam Meningkatkan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir (Studi Pada Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Samosir)*". Skripsi Sarjana Pada Fisip Universitas Sumatera Utara.
- Yuningsih, Nining. 2005. "*Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan potensi objek wisata pantai pangandaran di Kabupaten Ciamis Jawa Barat*". Skripsi Sarjana Pada Fakultas Ilmu Sosial.
- Internet**
http://bintankab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Pariwisata-Kabupaten-Bintan-2015.pdf (diakses pada 17 Januari 2016)

<http://html.batampos.co.id/read/2015/12/12/30874/Wow-Pariwisata-Bintan-Dulang-Rp-9279-M> (diakses pada 16 Februari 2016)

http://ilmu-politik-ubakrie.blogspot.co.id/2013/06/analisis-pengaruh-pihak-swasta-terhadap_9439.html?m=1 (diakses 16 Februari 2016)

[http://sonnylazio.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-dan-](http://sonnylazio.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-)

[sumber-sumber-
pendapatan.html](http://sonnylazio.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html)?m=1 (diakses pada 16 Februari 2016)

http://www.bintantourism.com/?Visi_Misi (diakses pada 28 Januari 2016)

<http://ideecantik.blogspot.co.id/2015/05/keterkaitan-infrastruktur-pada.html>?m=1 (diakses pada 05 Oktober 2016)